

**PENYUSUNAN REKOMENDASI STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN  
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN) PADA  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**Shania Kamalia<sup>1</sup>, Aries Susanty<sup>1\*</sup>**

Email : [kamaliashania@gmail.com](mailto:kamaliashania@gmail.com)

<sup>1</sup>*Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

**Abstrak**

Ketidakselarasan data pada perencanaan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan realisasinya pada pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia. Perencanaan penggunaan PDN yang mencapai angka 630 triliun rupiah, nyatanya hanya tercapai 35 triliun saja, atau 5,55% dari target perencanaan pengadaan PDN pada PBJP. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kendala penggunaan PDN pada PBJP dan keterkaitan antarvariabel kendala tersebut yang akan digunakan sebagai referensi dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Interpretive Structural Modelling* (ISM) untuk proses penilaian hubungan kontekstual antarvariabel, metode *DEMATEL* untuk mengetahui seberapa besar hubungan antarvariabel, serta metode Delphi untuk penyusunan rekomendasi strategi dengan melibatkan beberapa ahli dari pelaku pengadaan dan penyedia barang/jasa. Empat belas variabel kendala teridentifikasi dengan satu variabel diantaranya ditetapkan sebagai variabel kunci menurut hasil model ISM dan analisis MICMAC, yaitu terkait belum terkonsolidasinya berbagai peraturan terkait penggunaan PDN dalam satu peraturan perundangan-undangan.

**Kata kunci:** **Produk Dalam Negeri (PDN), *Interpretive Structural Modelling* (ISM), *DEMATEL***

**Abstract**

Data inconsistency in planning the use of domestic products (PDN) and its realization in government procurement of goods/services (PBJP) is one of the problems currently being faced by the Indonesian government. Planning for the use of PDN which reached 630 trillion rupiahs, in fact only reached 35 trillion, or 5.55% of the PDN procurement planning target in PBJP. The purpose of this study was to determine the constraints on the use of PDN in PBJP and the interrelationships between these constraint variables which will be used as a reference in preparing recommendations for improvement. The method used in this study is the Interpretive Structural Modeling (ISM) to assess contextual relationships between variables, DEMATEL method to determine the extent of the relationship between variables, and Delphi method to prepare strategic recommendations. Fourteen constraining variables were identified with one variable among which was determined as a key variable according to the results of the ISM model and MICMAC analysis, namely related to the unconsolidated various regulations related to the use of PDN in one statutory regulation.

**Keywords:** **Domestic Product (PDN), Interpretive Structural Modeling (ISM), DEMATEL**

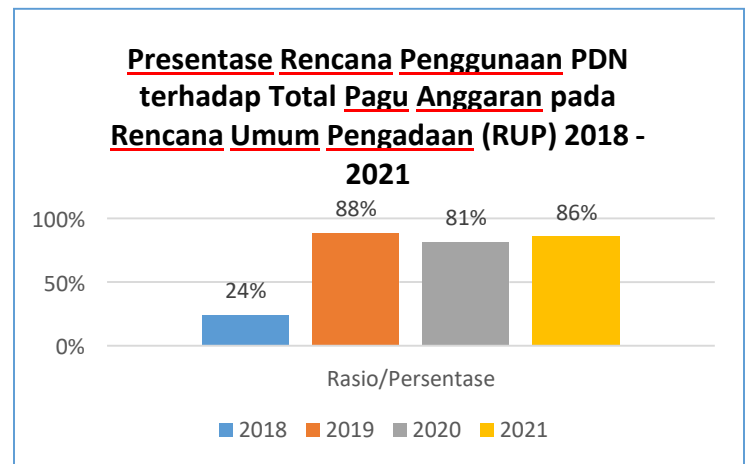
## 1. PENDAHULUAN

Optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) diharapkan akan menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, dimana sektor industri akan menjadi penggerak perekonomian nasional. Dengan harapan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan negara importir, memiliki daya kekuatan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia, yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memperkokoh ketahanan nasional. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan PDN, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dan tokoh masyarakat berperan aktif memberikan teladan dalam penggunaan PDN.

Beberapa langkah yang telah diambil oleh Pemerintah adalah melakukan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 15

Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (PP Pemberdayaan Industri).

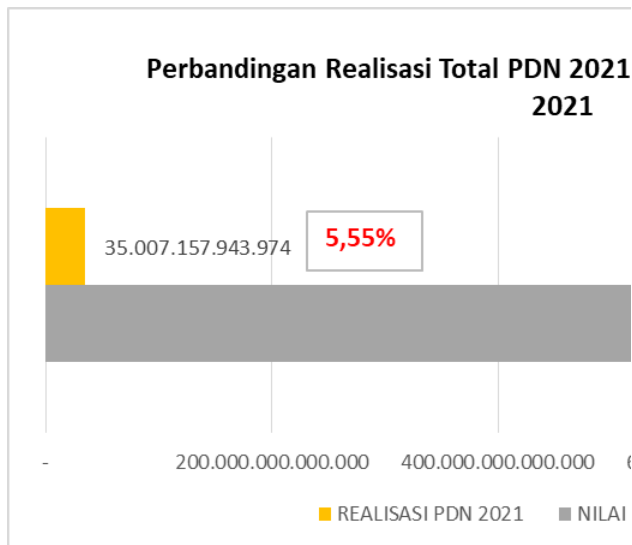
Dari data yang diambil dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), diketahui bahwa terdapat peningkatan dalam perencanaan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yang didapatkan dari pelaku pengadaan di K/L/P/D.



**Gambar 1. Perbandingan Rencana Penggunaan PDN terhadap Total Pagu Anggaran tahun 2018 - 2021**

Dari gambar di atas dapat dilihat peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019 di mana terdapat peningkatan penggunaan PDN pada tahap perencanaan sebesar 64%

menjadi 88% yang diikuti tahun – tahun berikutnya. Meskipun demikian, berdasarkan data realisasi dari rencana penggunaan PDN pada PBJP masih sangat jauh dari harapan yaitu berada di angka 5,55% pada tahun 2021 di mana pada rencana telah ditetapkan penggunaan PDN sebanyak 86%.



**Gambar 2. Realisasi Nilai Total PDN terhadap Nilai Kontrak 2021**

Penelitian tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui kendala penggunaan PDN pada PBJP dan keterkaitan antarvariabel kendala tersebut guna menyusun rekomendasi strategi yang tepat agar dapat mengatasi kendala penggunaan PDN pada PBJP. Untuk itu, digunakan metode ISM (*Interpretive Structural Modelling*) untuk memodelkan keterkaitan antar variabel – variabel penghambat tersebut (Halim, 2021) dan metode DEMATEL (*Decision Making*

*Trial and Evaluation Laboratory*) yang dapat mengidentifikasi variabel – variabel dominan yang menghambat realisasi penggunaan PDN pada PBJP. Setelah itu akan dilakukan penyusunan rekomendasi menggunakan metode *Delphi* sehingga diperoleh rekomendasi strategi yang tepat dalam realisasi penggunaan PDN pada PBJP.

## 2. METODE PENELITIAN

- a. Identifikasi variabel kendala yang dilakukan dengan melakukan studi literatur dan wawancara dengan beberapa responden ahli terkait kebijakan publik penggunaan PDN.
- b. Validasi variabel kendala awal dilakukan dengan *Content Validity Index* (CVI) untuk menilai kesesuaian variabel tersebut terhadap kondisi penggunaan PDN pada PBJP.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data mengenai hubungan kontekstual dengan metode ISM dan DEMATEL.
- d. Hasil pengolahan data tersebut kemudian dianalisis untuk membantu proses penyusunan rekomendasi strategi.

- e. Rekomendasi tersebut didasarkan pada variabel kendala yang dinilai paling berpengaruh berdasarkan hasil pengolahan data.
- f. Setelah rekomendasi strategi dibuat, maka dilakukan validasi terhadap rekomendasi strategi tersebut dengan menggunakan metode *Delphi*.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Validasi Faktor Penghambat

Validasi variabel kendala yang telah diidentifikasi seperti yang ditampilkan pada Tabel 1 dilakukan oleh 65 ahli pelaku pengadaan melalui pengisian kuesioner. Variabel-variabel tersebut didapatkan dari penelitian karya Wells & Hawkins (2010), Mubarok, dkk. (2020), Nurcahyo, dkk. (2019), Sutmasa (2016), Risnain (2018), Siddique (2016), Maponga & Musa (2021). Berikut adalah 14 faktor penghambat yang lolos validasi :

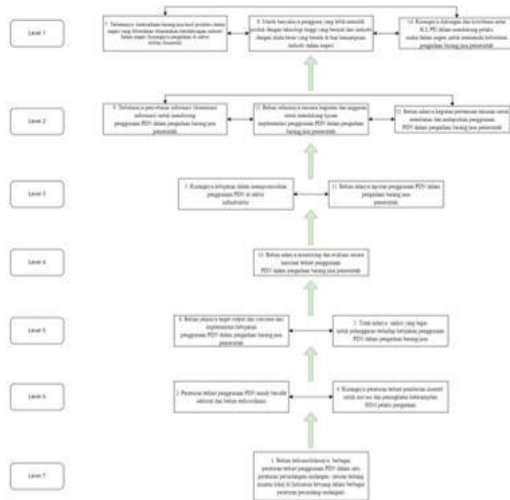
**Tabel 1. Faktor Penghambat**

No	Faktor Penghambat (Terdapat Penyesuaian Bahasa)		Jumlah Responden Setuju	Nilai I-CVI
1	Belum terkonsolidasinya berbagai peraturan terkait penggunaan PDN dalam satu peraturan perundangan-undangan (aturan tentang muatan lokal di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan)	REG1	57	0,877
2	Peraturan terkait penggunaan PDN masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi	REG2	57	0,877
3	Kurangnya kebijakan dalam mempromosikan penggunaan PDN di sektor infrastruktur	REG7	54	0,831
4	Kurangnya peraturan terkait pemberian insentif untuk inovasi dan peningkatan keterampilan SDM pelaku pengadaan	REG8	56	0,862
5	Tidak adanya sanksi yang tegas untuk pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa	REG9	55	0,846
6	Belum jelasnya target output dan outcome dari implementasi kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	REG10	56	0,862
7	Terbatasnya ketersediaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri yang dibutuhkan dikarenakan ketidaksiapan industri dalam negeri (kurangnya pengadaan di sektor utilitas domestik)	PLOK4	55	0,846

**Tabel 1. Faktor Penghambat  
(Lanjutan)**

No	Faktor Penghambat (Terdapat Penyesuaian Bahasa)		Jumlah Responden Setuju	Ni (
8	Masih banyaknya pengguna yang lebih memilih produk dengan teknologi tinggi yang berasal dari industri dengan skala besar yang berada di luar kemampuan industri dalam negeri	TEKN1	59	0
9	Terbatasnya penyebaran informasi (diseminasi informasi) untuk mendorong penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	TEKN2	57	0
10	Belum adanya monitoring dan evaluasi secara nasional terkait penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	MON1	57	0
11	Belum adanya laporan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	MON2	55	0
12	Belum adanya kegiatan/pertemuan tahunan untuk membahas dan melaporkan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	MON3	58	0
13	Belum selarasnya rencana kegiatan dan anggaran untuk mendukung tujuan implementasi penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	KOR3	56	0
14	Kurangnya dukungan dan koordinasi antar K/L/PD dalam mendukung pelaku usaha dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah	KOR4	55	0

**3.2 Analisis ISM dan Model MICMAC**



**Gambar 3. Grafik ISM**

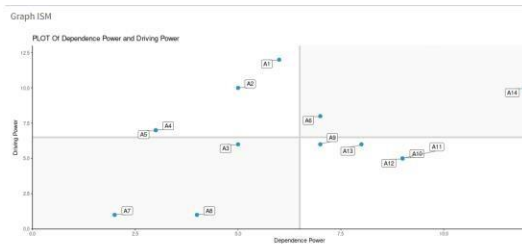
ISM adalah suatu metode yang berfungsi untuk membuat suatu peta hubungan antarvariabel yang terlibat dalam suatu peristiwa yang rumit (Darmawan, 2017). Pengolahan dengan metode ISM menginterpretasikan hubungan antar variabel secara hierarkikal dimana

variabel akan dibagi kedalam beberapa tingkatan level sesuai dengan hasil proses *level partitioning*. Untuk tingkatan atau level tertinggi merupakan variabel level pertama, yang berarti variabel tersebut tidak memimpin atau menggerakkan variabel lainnya. Sebaliknya, variabel yang ditempatkan pada posisi paling bawah merupakan variabel kunci, di mana variabel tersebut dapat menggerakkan atau mempengaruhi variabel lainnya yang berada di level atas. Berdasarkan proses iterasi yang dihasilkan pada Tabel 4.25, variabel- variabel tersebut dibagi kedalam 5 level. Berikut ini merupakan pembagian level pada model ISM :

- a. Pada level 1 ditempati oleh 3 variabel, yaitu variabel 7 (Terbatasnya ketersediaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri yang dibutuhkan dikarenakan ketidaksiapan industri dalam negeri (kurangnya pengadaan di sektor utilitas domestik)(PLOK 4)), variabel 8 (Masih banyaknya pengguna yang lebih memilih produk dengan teknologi tinggi yang berasal dari industri dengan skala besar yang berada di luar kemampuan industri

- dalam negeri (TEKN1)) dan variabel 14 (Kurangny dukungan dan koordinasi antar K/L/PD dalam mendukung pelaku usaha dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah (KOR4)).
- b. Level 2 terdapat 3 variabel yaitu variabel 9 (Terbatasnya penyebaran informasi (diseminasi informasi) untuk mendorong penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (TEKN 2)), variabel 12 (Belum adanya kegiatan/pertemuan tahunan untuk membahas dan melaporkan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (MON 3)), dan variabel 13 (Belum selarasnya rencana kegiatan dan anggaran untuk mendukung tujuan implementasi penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (KOR 3)).
- c. Level 3 terdapat 2 variabel yaitu variabel 3 (Kurangny kebijakan dalam mempromosikan penggunaan PDN di sektor infrastruktur (REG 7)) dan variabel 11 (Belum adanya laporan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (MON 2))
- d. Level 4 terdapat 1 variabel yaitu variabel 10 (Belum adanya monitoring dan evaluasi secara nasional terkait penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (MON 1)).
- e. Level 5 terdapat 2 variabel yaitu variabel 5 (Tidak adanya sanksi yang tegas untuk pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa(REG 9)) dan variabel 6(Belum jelasnya target output dan outcome dari implementasi kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (REG 10)
- f. Level 6 terdapat 2 variabel yaitu variabel 2 (Peraturan terkait penggunaan PDN masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi(REG 2)) dan variabel 4 (Kurangny peraturan terkait pemberian insentif untuk inovasi dan peningkatan keterampilan SDM pelaku pengadaan (REG 8))

g. Level 7 terdapat 1 variabel yaitu variabel 1 (Belum terkonsolidasinya berbagai peraturan terkait penggunaan PDN dalam satu peraturan perundangan-undangan (aturan tentang muatan lokal di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan) (REG 1))



**Gambar 4. MICMAC Analysis**

Variabel yang masuk dalam kuadran pertama merupakan variabel otonom yang memiliki *driving power* dan *dependence power* yang lemah. Variabel dalam kuadran ini umumnya relatif terputus dari sistem dan hanya memiliki sedikit hubungan. Hal ini berarti bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar pada sistem ataupun tidak memiliki hubungan yang kuat dengan variabel lainnya. Berdasarkan hasil MICMAC Analysis, variabel yang tergabung dalam kuadran ini variabel 3 (Kurangnnya kebijakan dalam mempromosikan penggunaan PDN di

sektor infrastruktur (REG 7)), variabel 7 (Terbatasnya ketersediaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri yang dibutuhkan dikarenakan ketidaksiapan industri dalam negeri (kurangnya pengadaan di sektor utilitas domestik)(PLOK 4)), dan variabel 8 (Masih banyaknya pengguna yang lebih memilih produk dengan teknologi tinggi yang berasal dari industri dengan skala besar yang berada di luar kemampuan industri dalam negeri (TEKN1)).

Variabel yang masuk dalam kuadran kedua merupakan variabel dependen yang memiliki *driving power* yang lemah tetapi memiliki *dependence power* yang kuat. Hal ini berarti variabel-variabel ini sangat tergantung dari input dan tindakan yang diberikan pada sistem, atau variabel-variabel di sektor ini merupakan variabel yang tidak bebas. Berdasarkan hasil MICMAC Analysis, variabel yang tergabung dalam kuadran ini adalah variabel 9 (Terbatasnya penyebaran informasi (diseminasi informasi) untuk mendorong penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (TEKN 2)), variabel 10 (Belum adanya monitoring

dan evaluasi secara nasional terkait penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (MON 1)), variabel 11 (Belum adanya laporan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (MON 2)), variabel 12 (Belum adanya kegiatan/pertemuan tahunan untuk membahas dan melaporkan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (MON 3)), dan variabel 13 (Belum selarasnya rencana kegiatan dan anggaran untuk mendukung tujuan implementasi penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (KOR 3)).

Variabel yang masuk dalam kuadran ketiga merupakan variabel *linkage* yang memiliki *driving power* yang kuat dan *dependence power* yang kuat. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel tersebut harus dikaji secara hati-hati karena hubungan antar variabel tidak stabil karena setiap tindakan terhadap variabel-variabel ini akan memiliki efek pada variabel lain dan juga umpan balik pada variabel itu sendiri. Berdasarkan hasil MICMAC *Analysis*, variabel yang tergabung dalam kuadran ini adalah variabel 4 (Kurangnya peraturan terkait

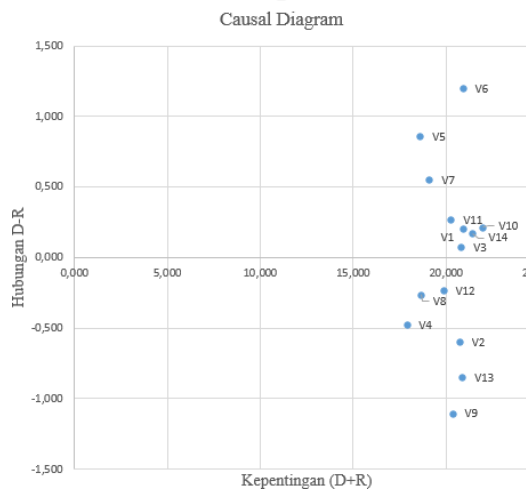
pemberian insentif untuk inovasi dan peningkatan keterampilan SDM pelaku pengadaan (REG 8)) dan variabel 6 (Belum jelasnya target output dan outcome dari implementasi kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (REG 10)).

Variabel yang masuk dalam kuadran keempat merupakan variabel independen yang memiliki *driving power* yang kuat tetapi memiliki *dependence power* yang lemah. Hal ini berarti bahwa variabel pada sektor ini merupakan bagian sisa dari sistem dan disebut variabel bebas, namun variabel-variabel tersebut menjadi penggerak atau pengaruh yang kuat bagi variabel lainnya di mana setiap tindakan terhadap variabel-variabel ini akan memiliki efek pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil MICMAC *Analysis*, variabel yang tergabung dalam kuadran ini adalah variabel 1 (Belum terkonsolidasinya berbagai peraturan terkait penggunaan PDN dalam satu peraturan perundangan-undangan (aturan tentang muatan lokal di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundangan-undangan) (REG 1)), variabel 2 (Peraturan terkait penggunaan PDN



masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi(REG 2)), variabel 4 (Kurangnya peraturan terkait pemberian insentif untuk inovasi dan peningkatan keterampilan SDM pelaku pengadaan (REG 8)), dan variabel 5 (Tidak adanya sanksi yang tegas untuk pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa(REG 9)).

### 3.3 Analisis DEMATEL



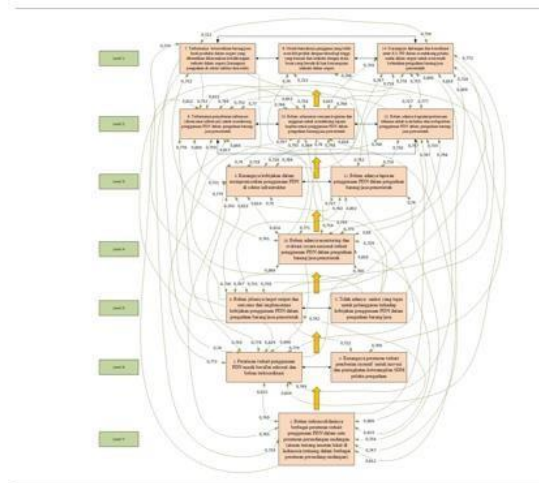
**Gambar 5. Causal Diagram**

Hasil perhitungan DEMATEL kemudian diinterpretasikan dalam bentuk *causal diagram* yang ditunjukkan oleh Gambar 3.3. Berdasarkan perhitungan nilai D+R, diketahui bahwa terdapat delapan variabel yang memiliki nilai (D+R) positif sehingga dapat dianggap delapan faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang penting dan

berpengaruh terhadap terhambatnya penggunaan PDN pada PBJP (*Dispatcher*). Faktor – faktor tersebut adalah variabel 1 (Belum terkonsolidasinya berbagai peraturan terkait penggunaan PDN dalam satu peraturan perundangan-undangan (aturan tentang muatan lokal di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan) (REG 1)), variabel 3 (Kurangnya kebijakan dalam mempromosikan penggunaan PDN di sektor infrastruktur (REG 7)), variabel 5 (Tidak adanya sanksi yang tegas untuk pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa(REG 9)), variabel 6 (Belum jelasnya target output dan outcome dari implementasi kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (REG 10)), variabel 7 (Terbatasnya ketersediaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri yang dibutuhkan dikarenakan ketidaksiapan industri dalam negeri (kurangnya pengadaan di sektor utilitas domestik)(PLOK 4)), variabel 10 (Belum adanya monitoring dan evaluasi secara nasional terkait

penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (MON 1)), variabel 11 (Belum adanya laporan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (MON 2)), variabel 14 (Kurangnya dukungan dan koordinasi antar K/L/PD dalam mendukung pelaku usaha dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah (KOR4)).

### 3.4 Analisis Integrated ISM-DEMATEL Graph



**Gambar 6. Integrated ISM-DEMATEL Graph**

*Integrated ISM-DEMATEL Graph* dibuat berdasarkan perhitungan ISM dan juga DEMATEL yang dapat dilihat pada Gambar 3.4. *Integrated ISM-DEMATEL Graph* tersebut membagi variabel menjadi 7 level

sesuai dengan hasil perhitungan ISM, sedangkan untuk derajat pengaruh antar faktor penghambat penggunaan PDN pada PBJP didapatkan dari hasil perhitungan *Network relationship Map* pada Tabel 4.31. Pada level terakhir dari hirarki tersebut diisi dengan variabel 1 dimana faktor tersebut merupakan faktor prioritas berdasarkan metode ISM. Hal ini selaras dengan perhitungan dengan metode DEMATEL yang mengelompokkan variabel tersebut sebagai faktor yang perlu ditangani. Hubungan antara komponen yang berada pada level bawah dengan level atasnya didasarkan pada panah hijau di Gambar 4.5. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa level bawah memiliki pengaruh yang besar terhadap level-level di atasnya.

### 3.5 Analisis Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode ISM dan DEMATEL, didapatkan 14 faktor penghambat. Berdasarkan 14 faktor tersebut, dibuatlah strategi untuk menanggulangi faktor penghambat koordinasi penggunaan PDN pada PBJP agar sistem yang berlaku dapat menjadi lebih efektif. Proses pembuatan strategi, diawali

dengan melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) yang kemudian divalidasi menggunakan teknik *delphi* agar peneliti dapat melihat efektivitas dari masing-masing strategi. Selain itu penggunaan teknik ini juga ditujukan untuk melihat konsensus persetujuan dari para ahli yang dilakukan dengan uji Kendal W. Pada putaran pertama, dilakukan penyusunan rekomendasi berdasarkan FGD dan juga wawancara dengan para ahli seperti pada Tabel 4.32. Kemudian pada putaran kedua akan melibatkan ahli untuk menilai efektivitas strategi dengan menggunakan kuesioner yang disediakan oleh peneliti. Masing-masing faktor penghambat ditanggulangi dengan strategi yang berbeda-beda. Terdapat 10 rekomendasi strategi yang didapat yaitu menyusun petunjuk teknis tentang perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa hasil produk dalam negeri (PDN), baik untuk dana yang bersumber dari APBN/APBD maupun dari pinjaman LN (SR 1), melakukan sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait PDN kepada seluruh pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Penyedia) serta Pelaku Usaha (SR 2), melakukan konsolidasi dengan kementerian terkait untuk meningkatkan kesepahaman atas peraturan terkait Peningkatan

penggunaan PDN Pengadaan Barang/Jasa (SR 3), memfasilitasi layanan sertifikasi TKDN PDN (SR 4), meningkatkan efektivitas penggunaan E-Purchasing untuk penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (SR 5), mengintegrasikan database kebutuhan barang/jasa PDN pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (SR 6), mendorong pengintegrasian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan Sistem Informasi Kementerian terkait (SR 7), melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan PDN pada keseluruhan tahapan pengadaan barang/jasa (SR 8), mengkonsolidasikan permintaan barang/jasa hasil PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (SR 9), dan memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa hasil PDN (SR 10).

#### **4. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil validasi menggunakan metode *Content Validity Index* (CVI), didapatkan 14 faktor penghambat penggunaan PDN pada PBJP. Faktor – faktor tersebut tergolong dalam 5 golongan yaitu enam variable regulasi, satu variabel ketersediaan penyedia lokal, dua variabel teknologi, tiga variabel monitoring, dan

- dua variabel koordinasi kebijakan antar K/L/P/D.
2. Hasil model ISM dan DEMATEL mengindikasikan adanya hubungan antar 14 faktor tersebut seperti yang telah dimodelkan pada Gambar 4.4. Pada metode ISM, level 1 diisi oleh variabel 7,8, dan 14, level 2 diisi oleh variabel 9,13,12, level 3 diisi oleh variabel 3 dan 11, level 4 diisi oleh variabel 10, level 5 oleh variabel 5 dan 6, level 6 diisi oleh variabel 2 dan 4, serta level 7 diisi oleh variabel 1. Pada tiga level yang memiliki pengaruh terbesar, yaitu level 5,6, dan 7, variabel tergolong dalam variabel regulasi. Sedangkan pada metode DEMATEL, variabel dibagi menjadi dua yaitu Dispatcher dan Receiver. Di mana variabel dispatcher ada 8 yaitu variabel 1,3,5,6 yang merupakan variabel regulasi, variabel 7 yang merupakan variabel ketersediaan penyedia lokal, variabel 10 dan 11 yang merupakan variabel monitoring, dan variabel 14 yang merupakan variabel koordinasi kebijakan antar K/L/P/D.
  3. Dari 14 faktor penghambat dibuat 10 strategi rekomendasi yang dinilai cukup efektif untuk menangani faktor-faktor prioritas tersebut. Dari 10 rekomendasi strategi, nilai efektivitas tertinggi terdapat pada

strategi rekomendasi 2,3,5,6, dan 8 dengan nilai 4,6. Kemudian diikuti dengan strategi rekomendasi 1 dan 7 dengan nilai 4,4. Diikuti dengan strategi rekomendasi 4 dengan nilai 4,2, rekomendasi strategi 9 dengan nilai 4, dan strategi rekomendasi 10 dengan nilai 3,6.

#### **Daftar Pustaka**

- Risnain, M. (2018). The Model of Policy and Regulation of Local Content Requirements in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law Vol 5 No 3*.
- Siddique, W. (2016). Critical Success Factors Affecting E-Government Policy Implementation in Pakistan. *Journal of Democracy*.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. *Journal of Public Administration Studies*.
- Nurchahayo, R., Hutasoit, E. L., Muslim, E., & Wibowo, A. D. (2019). A Strategy of Local Content Enhancement in Petroleum and Natural Gas Industry. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. Bangkok.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. *Journal of Public Administration Studies*.
- Nurchahayo, R., Hutasoit, E. L., Muslim, E., & Wibowo, A. D. (2019). A Strategy of Local

Content Enhancement in Petroleum and Natural Gas Industry. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. Bangkok.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawati*.

Wells , J., & Hawkins, J. (2009). Increasing 'local content' in infrastructure procurement.

